

ABSTRAK

Dianna Maila Rahmany, NIM. 1223030037, (2026): Tinjauan Terhadap Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang Oleh Dinas PUPR dan Implikasinya di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Perspektif Siyasah Dusturiyah

Perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di Desa Cimahi Kecamatan Klari yang berbatasan langsung dengan kawasan industri aktif. Dalam praktiknya, pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR menjadi bagian penting dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini mendorong pentingnya kajian mengenai mekanisme rekomendasi teknis serta dampaknya terhadap masyarakat dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2022, menganalisis implikasi yang ditimbulkan terhadap masyarakat Desa Cimahi, serta meninjau pelaksanaan kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan teori penataan ruang, teori implementasi kebijakan publik, dan teori siyasah dusturiyah sebagai landasan analisis. Teori penataan ruang digunakan untuk memahami mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, teori implementasi kebijakan publik digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, sedangkan teori siyasah dusturiyah digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang, pemerintah Desa Cimahi, ketua RW Dusun Kompa, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri di sekitar wilayah penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang secara normatif telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala pada aspek pengawasan, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat sehingga menimbulkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat Desa Cimahi. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.